

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

1.1.1 UMKM Kota Bandung

Kota Bandung merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat dan juga termasuk salah satu kota metropolitan di Indonesia yang menempati peringkat ketiga (Bandung.go.id, 2023). Luas wilayah Kota Bandung sekitar 16.729,65 Ha dan memiliki total 30 kecamatan dengan penduduk pada tahun 2022 yaitu 1.275.897 jiwa laki-laki dan 1.269.108 juta jiwa perempuan. Menurut Ginting *et al* (2019), Pemerintah Kota Bandung berkomitmen keras untuk mempercepat perkembangan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan daya saing di tingkat nasional.

Dalam membangkitkan perekonomian Kota Bandung, Dinas UMKM Kota Bandung sendiri memiliki strategi yaitu dengan membuat program pelatihan dan pembinaan yang juga didampingi oleh konsultan untuk setiap UMKM (Bandung.go.id, 2024). Selain itu, Dinas UMKM juga membuat Sarana Layanan Pemasaran KUMKM (Salapak) yang bertujuan untuk memfasilitasi UMKM dalam meningkatkan digital marketing, mempromosikan produknya, dan juga fasilitas pembiayaan (Bandung.go.id, 2024). Berdasarkan data dari Dinas UMKM Kota Bandung (2024), total UMKM yang ada di Kota Bandung yaitu sebanyak 1.011 pada tahun 2023 naik sebesar 40.03% atau 289 dari tahun 2022 yang berjumlah 722.

1.1.2 UMKM Sektor Kuliner di Kota Bandung

Kota Bandung tidak hanya dikenal dengan berbagai destinasi wisatanya yang dapat menarik wisatawan, tetapi juga dengan wisata kuliner yang menjadi aspek penting, dimana para wisatawan sering merasa kunjungan mereka belum lengkap tanpa mencicipi hidangan khas dari daerah setempat (Ginting *et al*, 2019). Dengan berbagai potensi dan keindahan yang dimiliki Kota Bandung menjadikan Bandung sebagai kota dengan potensi bisnis kuliner kreatif yang menjanjikan

(Bisnis Bandung, 2024).

Berdasarkan data dari iNews (2023) dalam survei Taste Atlas menyatakan bahwa Kota Bandung merupakan kota dengan kuliner terbaik se-Asia Tenggara dengan memperoleh rating sebesar 4,66 mengalahkan Jakarta, Surabaya, dan juga Bangkok. Adapun sajian kuliner yang menjadi favorit di Kota Bandung diantaranya seperti batagor, seblak, mi kocok, kupat tahu, cuanki, dan juga soto Bandung. Menurut data dari Dinas UMKM Kota Bandung (2024), jumlah unit usaha kuliner di Kota Bandung pada tahun 2023 yaitu sebanyak 558 unit usaha dari tahun sebelumnya yaitu 355 pada tahun 2022, 831 pada tahun 2021, dan 136 pada tahun 2020. Meskipun jumlahnya fluktuatif akibat adanya Pandemi Covid-19 yang melanda, tetapi perkembangan usaha sektor kuliner di Kota Bandung cukup stabil karena adanya kreativitas dan adaptasi ke penjualan digital atau online yang dilakukan oleh para pelaku usaha (Bandung.go.id, 2023).

Berdasarkan data dari Dinas UMKM Kota Bandung (2024), sektor kuliner merupakan sektor dengan jumlah usaha terbanyak yang menjadi binaan di Dinas UMKM Kota Bandung. Jumlah unit usaha kuliner di Kota Bandung pada tahun 2023 yaitu sebanyak 558, fesyen sebanyak 163, dan kriya sebesar 90 (Dinas UMKM Kota Bandung, 2024).

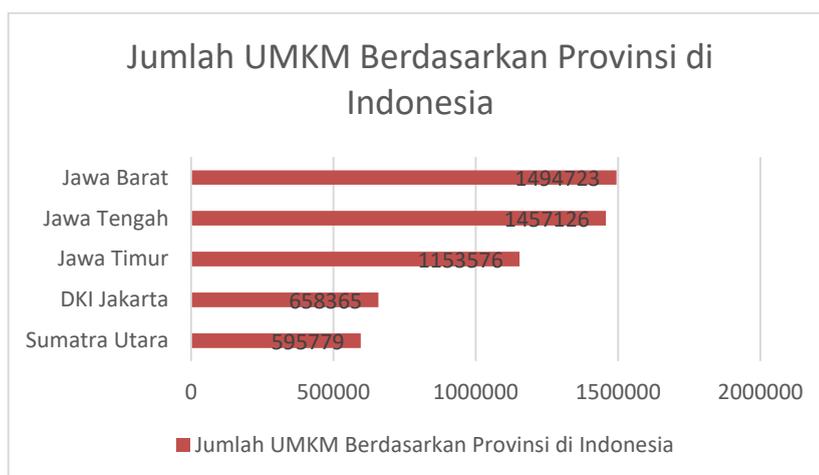
1.2 Latar Belakang Penelitian

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peranan penting di negara berkembang seperti di Indonesia dimana UMKM menjadi pilar untuk perekonomian negara (Maswin & Sudrajat., 2022). UMKM berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, mendorong inovasi, dan memberi sumbangan pada Produk Domestik Bruto (PDB) (Wube & Atwal, 2023; Devi et al., 2023). Berdasarkan data dari DJPB (2023) survei Kementerian KUKM tahun 2021 menyatakan bahwa jumlah total UMKM di Indonesia saat ini sekitar 64,2 juta dan telah berperan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) negara yaitu 61,07% setara dengan Rp8.573.89 triliun rupiah, menyerap sekitar 117 juta pekerja yang mencakup 97% dari keseluruhan tenaga kerja, serta dapat menghimpun hingga 60,4% dari keseluruhan investasi di

Indonesia (Kemenkop UKM, 2021).

UMKM mampu bertahan menghadapi berbagai krisis yang terjadi contohnya seperti saat pandemi Covid-19 dimana UMKM menjadi penopang perekonomian Indonesia (Natasya et al, 2019). Survei dari Bank Indonesia (2020) menyatakan sekitar 87,5% UMKM Indonesia terkena dampak Covid-19 secara ekonomi dan hanya sekitar 27,6% yang dapat meningkatkan penjualannya. Namun, UMKM tetap mampu bertahan dengan adanya teknologi dan inovasi yang menjadikan UMKM sebagai penopang perekonomian (Ciptono et al., 2023)

Meskipun demikian, pada faktanya UMKM masih menghadapi masalah dan tantangan dalam perkembangannya. Kurangnya modal, minimnya pengalaman manajemen, kurangnya literasi keuangan, dan terbatasnya akses terhadap pendanaan menjadi tantangan yang paling sering dihadapi oleh UMKM di Indonesia (Maswin & Sudrajat, 2022; Fachrurazy, 2022; Jumady et al., 2022). Selain itu, kebijakan yang berubah-ubah dan lingkungan bisnis yang kurang mendukung juga menjadi tantangan UMKM untuk berkembang (Olorunshulo & Odeyemi, 2021; Chisanga et al., 2020).



Gambar 1. 1 Jumlah UMKM di indonesia Berdasarkan Provinsi

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2023)

Menurut UMKMINDONESIA.ID (2023), dalam survei Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan bahwa pemerintah meluncurkan platform *Online Single Submission - Risk Based Approach* (OSS RBA) untuk pendaftaran perizinan usaha dimana pada 2022 tercatat sudah ada sebanyak 8,71 UMKM yang terdaftar.

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa Jawa Barat menjadi provinsi yang memiliki UMKM paling banyak di Indonesia yaitu sebanyak 1.494.723 (UMKMINDONESIA., 2023). Keberadaan UMKM yang besar di Jawa Barat tidak hanya menunjukkan potensi ekonomi yang kuat di daerah tersebut, tetapi hal itu juga mencerminkan peranan UMKM untuk memajukan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang kerja di tingkat daerah (Ginting et al., 2019)

Kota Bandung sendiri memiliki kontribusi yang besar dalam penyumbang angka kenaikan UMKM di Provinsi Jawa Barat (Dinas UMKM Kota Bandung, 2024). Adapun jumlah UMKM di Kota Bandung adalah seperti berikut:

Tabel 1.1 Jumlah UMKM di Kota Bandung

Jumlah UMKM di Kota Bandung Tahun 2019-2023				
2019	2020	2021	2022	2023
360	268	1.850	722	1.011

Sumber: (Data diolah peneliti, 2023)

Berdasarkan Tabel 1.1 dari data Dinas UMKM Kota Bandung (2024) dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 jumlah UMKM di Kota Bandung yaitu 360. Di tahun 2020 turun sebesar 25,56% menjadi 268. Kemudian di tahun 2021 meningkat pesat sebanyak 590,30% menjadi 1.850 sebelum akhirnya turun kembali di tahun 2022 sebesar 60,97% menjadi 722 dan pada akhirnya naik kembali sebesar 40,03% menjadi 1.011 unit usaha di tahun 2023.

Di Bandung sendiri terdapat 3 sektor UMKM unggulan yang terdiri dari sektor kuliner, kriya, dan fesyen (Humas Kota Bandung, 2022). Berdasarkan data dari Dinas UMKM Kota Bandung (2024), UMKM sektor Kuliner di Kota Bandung berjumlah 558, fesyen berjumlah 163, dan kriya berjumlah 90. UMKM kuliner menjadi sektor terbanyak yang ada di Kota Bandung dan juga berkontribusi dalam peningkatan lapangan pekerjaan sebesar 13,94% (Badan Pusat Statistik Kota Bandung, 2023). Adapun total UMKM sektor kuliner di Kota Bandung yaitu sebagai berikut.

Tabel 1. 2 Jumlah UMKM sektor kuliner di Kota Bandung

Jumlah UMKM Sektor Kuliner di Kota Bandung Tahun 2019-2023				
2019	2020	2021	2022	2023
201	136	831	355	558

Sumber: (Data diolah peneliti, 2023)

Berdasarkan Tabel 1.2 data dari Dinas UMKM Kota Bandung (2024) menyatakan bahwa jumlah unit usaha kuliner di Kota Bandung menunjukkan fluktuasi yang naik turun. Tercatat pada tahun 2019, terdapat 201 unit usaha kuliner, namun jumlah ini turun sebesar 32,34% menjadi 136 unit usaha di tahun 2020. Meskipun demikian, terjadi kenaikan sebesar 511,03% sehingga jumlahnya menjadi 831 di tahun 2021, sebelum kembali turun 57,28% menjadi 355 unit usaha di tahun 2022 dan naik kembali 57,18% menjadi 558 unit usaha di tahun 2023.

Berdasarkan data dari iNews (2023) dalam penilaian Taste Atlas 2023/2024 Kota Bandung menjadi kota yang memiliki kuliner terbaik di Asia Tenggara. Kuliner yang ada di Kota Bandung mendapatkan rating 4,66 unggul satu poin dari kota Jakarta. Meskipun berada di peringkat ke-10 secara global, Bandung berhasil melampaui kota-kota di Asia Tenggara lainnya, termasuk Bangkok dan Singapura. Sehingga hal tersebut menjadikan Kota Bandung sebagai kota dengan kuliner yang paling baik di Indonesia (Sukarsih et al, 2019).

Namun dalam perkembangannya, UMKM yang ada di Kota Bandung masih menghadapi rintangan seperti kurangnya modal, pengalaman manajemen yang terbatas, susah untuk mengakses keuangan, dan masalah dasar terkait akuntansi serta pencatatan keuangan (Maswin & Sudrajat, 2022). Disisi lain, baik buruknya UMKM dilihat dari kinerja usahanya. Apabila kinerja usahanya baik maka kondisi UMKM juga dalam keadaan baik dan berpotensi untuk terus bertumbuh dan begitu pula sebaliknya (Pramestiningrum & Iramani, 2020).

Menurut Abdurohim (2021), Kinerja usaha merupakan hasil dari pekerjaan yang mampu dicapai oleh individu atau kelompok yang ada dalam organisasi serta berperan sebagai faktor penentu dalam mencapai tujuan yang melalui suatu proses. Menurut Rita et al., (2022), kinerja usaha UMKM dapat diukur melalui dua aspek, yakni finansial (akses pendanaan) dan Non finansial (prospek usaha, orientasi

kewirausahaan, dan dukungan kebijakan pemerintah). Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja usaha UMKM yaitu literasi keuangan (Frimpong et al, 2022; Desiyanti & Kasim, 2020; Purwanti & Fatmawati, 2023; Marija et al, 2021; Idawati & Pratama., 2020).

Literasi keuangan penting dalam suatu usaha karena kegiatan usaha tak lepas kaitannya dengan pembukuan, pencatatan, dan pengelolaan keuangan (Pramestiningrum & Iramani, 2020). Dengan pemahaman mengenai literasi keuangan, UMKM dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengoptimalkan laba, mengantisipasi kerugian, mengurangi biaya operasional, dan mengantisipasi risiko-risiko keuangan yang mungkin terjadi (Marija *et al.*, 2021; Jumady et al., 2022). Seorang pengusaha memerlukan kemampuan literasi keuangan untuk menjalankan usahanya (Hatammimi & Krisnawati, 2018). Dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi, UMKM mampu membuat keputusan finansial dan manajerial yang tepat serta berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pribadi (Rajendra & Sembiring, 2022; Idawati & Pratama, 2020; Firli & Dalilah., 2021).

Namun berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (2022), hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia hanya sebesar 49,68%. Sebagian besar UMKM belum memahami tentang bentuk, fungsi, dan juga manfaat dari laporan keuangan yang dengan kata lain UMKM masih memerlukan pemahaman tentang literasi keuangan (Risman, 2023). Padahal literasi keuangan sangat penting untuk bisa mencapai akses keuangan eksternal (Fachrurazy, 2022). Dengan literasi keuangan, pengusaha mampu membuat laporan keuangan dengan baik (Risman, 2023). Apabila laporan keuangan dibuat dengan baik maka akan memperbesar kemungkinan UMKM untuk mendapatkan pendanaan dari eksternal untuk dijadikan modal usaha (Rita et al., 2023).

Pada umumnya *financial capital* atau modal usaha berasal dari modal pribadi dan modal dari eksternal seperti bank, *venture capital*, ataupun investor (Rajendra & Sembiring, 2022). Menurut Perdana et al (2023), modal sangat dibutuhkan UMKM untuk memulai, mengoperasikan, dan mengembangkan usahanya. Dengan

financial capital yang dimiliki maka akan digunakan untuk kegiatan produksi yang dapat menghasilkan keuntungan (Rahadian & Thamrin, 2022). Apabila *financial capital* yang dimiliki meningkat, maka kegiatan produksi juga akan ikut meningkat sehingga dapat meningkatkan laba yang artinya kinerja usaha juga meningkat (Winarsih, 2021). Laba usaha tersebut nantinya dapat digunakan kembali untuk modal, perkembangan produk, ekspansi bisnis, dan aktivitas produksi lainnya (Rita et al, 2023). Sehingga *financial capital* sangat berpengaruh terhadap kinerja usaha dari suatu UMKM (Fayaz, 2020; Rahadian & Fadilah, 2021).

Namun faktanya modal masih menjadi permasalahan utama bagi UMKM (Cruz et al, 2023). Menurut Databoks (2022) dalam survei Mandiri Institute menyatakan bahwa 60,2% UMKM di Indonesia hanya bisa bertahan selama tiga bulan dengan modal pribadi, bahkan 21,34% nya hanya bertahan dalam waktu maksimal 1 bulan saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran pendanaan dari eksternal sangat dibutuhkan bagi UMKM agar dapat terus bertumbuh. Selain menambah modal, pendanaan eksternal juga dapat membuat UMKM lebih termotivasi bekerja, meningkatkan produk, inovasi dan ekspansi bisnis (Rita et al., 2023).

Meskipun demikian, menurut OJK (2022) dalam penelitian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia tahun 2020 menyatakan bahwa dari total 60 juta UMKM terdapat 46,6 juta atau 77,6% UMKM yang masih belum memperoleh pembiayaan dari perbankan maupun dari lembaga non bank lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal untuk usahanya. Menurut Risman (2023), kendala permodalan yang dialami oleh UMKM disebabkan karena kurang terpenuhinya persyaratan sebagai calon debitur seperti laporan keuangan untuk mengajukan pinjaman ke Bank ataupun sumber pendanaan lainnya.

Disisi lain, kebijakan pemerintah juga memberikan pengaruh terhadap kinerja UMKM (Chisanga, 2020; Nastasya et al, 2019; Yadewani et al., 2024). UMKM membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing (Devi et al., 2023). Dukungan tersebut dapat berupa program pendampingan, inkubasi bisnis, keuangan, dan sebagainya (Nor et al, 2023). Untuk

dapat meningkatkan kinerja usaha UMKM, pemerintah harus memberikan fasilitas dan regulasi yang mendukung UMKM (Nugroho et al, 2024). Namun faktanya, masih banyak UMKM yang belum mendapat manfaat dari kebijakan pemerintah karena kebijakan tidak sejalan dengan ekspektasi mereka (Olorunshulo & Odeyemi, 2021).

Menurut Kementerian Hukum & HAM RI (2023), permasalahan utama terkait kebijakan pemerintah yang dirasakan UMKM di Indonesia yaitu meliputi pendampingan yang kurang efektif, sulitnya akses terhadap modal, regulasi yang seringkali tidak sinkron dan tumpang tindih, serta tantangan dalam aspek legalitas dan perpajakan. Meskipun beberapa penelitian menyatakan kebijakan pemerintah memiliki pengaruh positif pada kinerja usaha, tetapi pada penelitian lain menyatakan kebijakan pemerintah tidak berpengaruh secara positif pada kinerja usaha (Olorunshulo & Odeyemi, 2021; Wube & Atwal, 2023, Musabayana et al, 2021; Pramestiningrum & Iramani, 2020).

Ketidakkonsistenan tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan, *financial capital* dan kebijakan pemerintah terhadap kinerja usaha UMKM sektor kuliner di Kota Bandung. Meskipun banyak hasil penelitian mengenai kinerja usaha UMKM, namun belum ada yang meneliti hubungan antara ketiga variabel tersebut secara parsial dan simultan terkhusus di Kota Bandung sehingga menjadi kebaruan pada penelitian ini selain dari objek dan lokasi penelitian. Oleh sebab itu, Peneliti tertarik untuk membuat kajian tentang “Pengaruh Literasi Keuangan, *Financial Capital*, dan Kebijakan Pemerintah terhadap Kinerja UMKM di Kota Bandung (Studi Kasus Subsektor Kuliner)”.

1.3 Perumusan Masalah

Baik buruknya UMKM dilihat dari kinerja usahanya, apabila kinerja usahanya baik maka kondisi UMKM juga dan begitu pula sebaliknya (Pramestiningrum & Iramani, 2020). Faktor-faktor yang mampu mempengaruhi kinerja usaha UMKM salah satunya yaitu literasi keuangan, *financial capital*, dan kebijakan pemerintah (Pramestiningrum & Iramani, 2020). Namun berdasarkan

data dari Otoritas Jasa Keuangan (2022), hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) mengungkapkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia hanya 49,68%. Menurut OJK (2022) dalam penelitian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia tahun 2020 menyatakan bahwa dari 60 juta UMKM, terdapat 46,6 juta atau 77,6% UMKM yang belum mendapatkan pembiayaan. Kemudian 60,2% UMKM di Indonesia hanya bisa bertahan selama tiga bulan dengan modal pribadi, bahkan 21,34% nya hanya bertahan dalam waktu maksimal 1 bulan saja (Databoks, 2023). Disisi lain, beberapa penelitian menunjukab bahwa kebijakan pemerintah tidak berpengaruh pada kinerja usaha UMKM. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, adapun pertanyaan penelitian diantaranya adalah:

1. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM sektor kuliner di Kota Bandung?
2. Bagaimana pengaruh *financial capital* terhadap kinerja UMKM sektor kuliner di Kota Bandung?
3. Bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kinerja UMKM sektor kuliner di Kota Bandung?
4. Bagaimana pengaruh literasi keuangan, *financial capital*, dan kebijakan pemerintah terhadap kinerja UMKM sektor kuliner di Kota Bandung

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari rumusan permasalahan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM sektor kuliner di Kota Bandung
2. Untuk mengetahui pengaruh *financial capital* terhadap kinerja UMKM sektor kuliner di Kota Bandung
3. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kinerja UMKM sektor kuliner di Kota Bandung

4. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan, *financial capital*, dan kebijakan pemerintah secara simultan terhadap kinerja UMKM sektor kuliner di Kota Bandung

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian harapannya dapat digunakan oleh akademisi maupun peneliti selanjutnya sebagai acuan penelitian lebih lanjut terkait masalah yang relevan sehingga dapat menjadi referensi pengetahuan dalam bidang ekonomi dan juga terkait kebijakan pemerintah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi UMKM, harapannya penelitian ini bisa menjadi salah satu aspek pertimbangan dalam mengoptimalkan kinerja UMKM dan menjadi sumber evaluasi terhadap pengembangan dan pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung sehingga menjadi lebih optimal di mendatang.
- b. Bagi Pemerintah, harapannya penelitian ini dapat memberikan pandangan yang bermanfaat untuk membantu dalam pembuatan kebijakan dan program-program yang bertujuan untuk mengembangkan dan memberdayakan UMKM di Indonesia, terutama di Kota Bandung, sehingga kontribusinya terhadap perekonomian nasional dapat ditingkatkan secara optimal.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Berikut merupakan sistematika dan penjelasan ringkas laporan penelitian ini, diantaranya:

- a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi: Gambaran Umum Objek penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas

Akhir.

b. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi teori dari umum sampai ke khusus, disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis jika diperlukan.

c. **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang: Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel (untuk kuantitatif) / Situasi Sosial (untuk kualitatif), Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas, serta Teknik Analisis Data.

d. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan terkait temuan tersebut.